BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KEUANGAN
DIPA 04
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Tahun Anggaran 2023
Untuk Periode yang berakhir 30 September 2023

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
Kelas IB

Jln. Banda Aceh-Medan, Desa Alue Awe, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh.
Email : ms.lhokseumawe@gmail.com

#bangga melayani bangsa

LAPORAN KEUANGAN

MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

Untuk Periode yang Berakhir 30 Sep 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.04

DIREKTORAT JENDERAL

BADAN PERDILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan – Banda Aceh, Desa Alue Awe Kec Muara Dua ota Lhokseumawe
Telp. 43925 Fax. (0645) 41809
Website: http://ms-lhokseumawe.go.id Email: ms.lhokseumawe@gmail.com

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE
Jl. Banda Aceh-Medan, Desa Alue Awe, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh
Telp. (0645) 43925 fax. (0645) 41809
website: *http://ms-lhokseumawe.go.id*, email: *ms.lhokseumawe@gmail.*

Nomor : 54/SEK.MS.W1-A5/KU2.1/X/2023 Lhokseumawe, 18 Oktober 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Laporan
Hal : Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan III 2023

Yth. Kepala KPPN Lhokseumawe
di
Lhokseumawe

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-28/PB/PB.6/2023 hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2023, bersama ini kami kirimkan Laporan Keuangan Satker **Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe (401665)** periode Triwulan III Tahun 2023 dan juga dapat diakses pada link drive https://linktr.ee/KPPN_LHOKSEUMAWE_089 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Yarvis Luthfi

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Lhokseumawe, 30 Sep 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,

MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

Yarvis Luthfi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Pernyataan Tanggung Jawab		iii
Ringkasan		1
I.	Laporan Realisasi Anggaran	3
II.	Neraca	4
III.	Laporan Operasional	5
IV.	Laporan Perubahan Ekuitas	6
V.	Catatan atas Laporan Keuangan	7
	A. Penjelasan Umum	7
	B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	17
	C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	23
	D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	39
	E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	47
	F. Pengungkapan Penting Lainnya	51
VI.	Lampiran dan Daftar	
	Lampiran A1 Rincian Aset Per 30 September 2023	60

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE
Jl. Banda Aceh-Medan, Desa Alue Awe, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh
Telp. (0645) 43925 fax. (0645) 41809
website: *http://ms-lhokseumawe.go.id*, email: *ms.lhokseumawe@gmail.com*

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan ekuitas, dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lhokseumawe, 30 Sep 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,

MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

Yarvis Luthfi

Laporan Keuangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Triwulan III Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Sep 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp24.776.000** atau mencapai persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar **Rp49.973.000**

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Sep 2023. Nilai Aset per 30 Sep 2023 dicatat dan disajikan sebesar **Rp10.588.000** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp10.588.000** Piutang Jangka Pendek (neto) sebesar **Rp13.234.000** Aset Tetap (neto) sebesar **Rp0** dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp0.**

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp(2.755.000)** dan **Rp13.343.000**

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Sep 2023 adalah sebesar **Rp24.776.000**, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar **Rp.61.803.955** sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp(37.027.955)**. Surplus Kegiatan Non Operasional dan surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar **Rp,** dan sebesar **Rp(37.027.955)** sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar **Rp.(37.027.955)**

1. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar **Rp0** dikurangi defisit-LO sebesar **Rp (37.027.955)** dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai **Rp0** dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp34.272.955.**sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Sep 2023 adalah senilai **Rp(2.755.000).**

2. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Sep 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 30 Sep Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual

MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEP 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Th. 2023					Th. 2022
	Catatan	Anggaran	Realisasi	Realisasi diatas (dibawah)	%	Realisasi
Pendapatan	B.1	-				
pendapatan PNBP	B.1	49.973.000	24.776.000	(25.197.000)	50	31.730.000
JUMLAH PENDAPATAN		49.973.000	24.776.000	(25.197.000)	50	31.730.000
BELANJA	B.2					
Belanja Pegawai	B.3	0				
Belanja Barang	B.4	76.850.000	58.315.000	18.535.000	76	35.598.250
Belanja Modal	B.5	0	0	0	0	0
Belanja Bantuan Sosial	B.6	0	0	0	0	0
JUMLAH BELANJA		**76.850.000**	**58.315.000**	**18.835.000**	**76**	**35.598.250**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LaporanKeuangan

MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE
NERACA
PER 30 SEP 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR	**C.1**		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	1.480.000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	9.108.000	27.786.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.1.3	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	0	0
Bagian Lancar TP/TGR	C.1.5	0	0
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.6	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.1.7	0	0
Belanja Dibayar di Muka	C.1.8	0	0
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.1.9	0	0
Persediaan	C.1.10	0	0
JUMLAH ASET LANCAR		10.588.000	27.786.000
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	-	-
Peralatan dan Mesin	C.2.2	-	-
Gedung dan Bangunan	C.2.3	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.2.6	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	-	0
JUMLAH ASET TETAP		-	0
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Tagihan TP/TGR	C.3.1	0	0
Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.2	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.3.3	0	0
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		0	0
ASET LAINNYA	C.4	0	0
Aset Tidak Berwujud	C.4.1	0	0
Aset Lain-Lain	C.4.2	0	0
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	0	0
JUMLAH ASET LAINNYA		0	0
JUMLAH ASET		**0**	**0**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**C.5**		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	9.108.000	27.786.000
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5.2	2.755.000	0
Uang Muka Dari KPPN	C.5.3	1.480.000	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		13.343.000	27.786.000
JUMLAH KEWAJIBAN		13.343.000	27.786.000
EKUITAS			
Ekuitas	C.7	(2.755.000)	0
JUMLAH EKUITAS		(2.755.000)	0
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEP 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	24.776.000	31.730.000
JUMLAH PENDAPATAN		**24.776.000**	**31.730.000**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	0	0
Beban Persediaan	D.3	4.183.955	612.000
Beban Barang dan Jasa	D.4	16.485.000	17.498.250
Beban Pemeliharaan	D.5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D.6	41.135.000	18.100.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0	0
JUMLAH BEBAN		**61.803.955**	**36.210.250**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(37.027.955)**	**(4.480.250)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Beban Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	0	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(37.027.955)**	**(4.480.250)**
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan Luar Biasa		0	0
Beban Luar Biasa		0	0
JUMLAH POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		**(37.027.955)**	**(4.480.250)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEP 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	-37.027.955	-4.480.250
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.4.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.4	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	-	-
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS			
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	34.272.955	4.480.250
KENAIKAN / PENURUNAN ENTITAS		-2.755.000	0
EKUITAS AKHIR	E.6	**- 2.755.000**	**-**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor 2005/BALAP.007/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Entitas berkedudukan Jalan Banda Aceh-Medan Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berkomitmen dengan visi *"**mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.**"* Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.

- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan 30 Sep tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

Pendapatan -LRA

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan -LO

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:

  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

  c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah;
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah,

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan

berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo

dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe memperoleh alokasi anggaran Tahun 2023 sebesar **Rp** 49.973.000 Selama Tahun 2023 dilakukan revisi atas DIPA Awal Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang disebabkan adanya Refocussing, Penghematan belanja Pemerintah serta Relokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan termasuk penyelesaian pagu minus pegawai. Anggaran Awal dan Anggaran Revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Perubahan DIPA

Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNBP	49.973.000	24.776.000
Jumlah Pendapatan	**49.973.000**	**24.776.000**
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	76.850.000	58.315.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	**76.850.000**	**58.315.000**

B.1. Pendapatan

RealisasiPendapatan Rp.24.776.000

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Sep 2023 2023 adalah sebesar **Rp24.776.000** atau mencapai **50,00** persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp49.973.000** Rincian pendapatan Satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak			
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum			
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	670.000	510.000	76.12
Pendapatan Ongkos Perkara	17.490.000	9.180.000	51.49
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	31.813.000	15.086.000	47.42
Jumlah	**49.973.000**	**24.776.000**	49.58

Realisasi Pendapatan periode 30 Sep 2023 mengalami perubahan dibandingkan 2022 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan periode 30 Sep 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0,00
pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	0	0,00
Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada panitera Badan Badan Peradilan	670.000	20.000	3.250,00
Pendapatan Ongkos Perkara	17.490.000	12.290.000	42,31
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	31.813.000	19.420.000	63,82
Jumlah	**49.973.000**	**31.730.000**	**3.356,13**

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara. Rp58.315.000

Realisasi Belanja instansi pada periode 30 Sep 2023 adalah sebesar Rp 56.315.000 atau 76,00% dari anggaran belanja sebesar Rp76.850.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja

Periode 30 Sep 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Sep 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	-	-	0,00
Belanja Barang	76.850.000	58.315.000	76,00
Belanja Modal	0	0	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Total Belanja Kotor	**76.850.000**	**58.315.000**	**76,00**
Pengembalian	0		0,00
Jumlah	**76.850.000**	**58.315.000**	**55,00**

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 30 Sep 2023 2023 mengalami Kenaikan **sebesar Rp. 18.535.000** (18.53) persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 Sep 2022. Hal ini disebabkan antara lain adanya pengurangan anggaran di belanja pegawai..

Perbandingan Realisasi Belanja
periode 30 Sep 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	0,00
Belanja Barang	58.315.000	35.598.250	63,81
Belanja Modal	-	-	0,00
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
Jumlah	**58.315.000**	**35.598.250**	**63,81**

Belanja Pegawai Rp0

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 30 Sep 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0** dikarenakan tidak ada alokasi anggaran untuk pegawai di DIPA 04 ini.

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang Rp76.850.000

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 30 Sep 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp58.315.000** dan **Rp35.598.250** Realisasi Belanja Barang periode 30 Sep 2023 mengalami Kenaikan sebesar 227.16 **%** dari Realisasi Belanja Barang periode 30 Sep 2022.

Perbandingan Belanja Barang
periode 30 Sep 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Barang Operasional	-	-	0,00
Belanja Pengriman Surat Dinas Pos Pusat	-	-	0,00
Belanja Bahan	1.485.000	-	0,00
Belanja Persediaan	3.450.000	-	0,00
Belanja Jasa	15.000.000	17.498.250	(25,00)
Belanja Perjalanan Dinas	38.380.000	18.100.000	202,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**58.315.000**	**35.598.250**	**227.16**
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	**58.315.000**	**35.598.250**	**227,16**

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal Rp0

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 30 Sep 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dalam periode tersebut tidak adanya ketersediaan belanja modal pada Anggaran tahun 2023;

Belanja Modal Tanah Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah periode 30 Sep 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Realisasi tersebut pada periode 30 Sep 2023 tidak mengalami **kenaikan/penurunan sebesar 0,00** persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran belanja modal tanah selama periode 30 Sep 2023 dan TA 2022

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
periode 30 Sep 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	**0**	**0**	0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 30 Sep 2023 adalah adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Realisasi tersebut pada periode 30 Sep 2023 tidak mengalami **kenaikan/penurunan sebesar 0,00** persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran belanja modal tanah selama periode 30 Sep 2023 dan TA 2022

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
periode 30 Sep 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin			
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian Belanja Modal			
Jumlah Belanja			

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 30 Sep 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0.** Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 30 Sep 2023 tidak mengalami **penurunan/peningkatan sebesar 0,00 %** persen dibandingkan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran belanja modal gedung dan bangunan periode 30 Sep 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
periode 30 Sep 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	%
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**0,00**
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**0,00**

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan periode 30 Sep 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan periode 30 Sep 2023 tidak **mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0,00 %.** Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan selama periode 30 Sep 2023 lebih kecil daripada TA 2022

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

periode 30 Sep 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	-		0,00
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**0,00**
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**0,00**

Belanja Bantuan Sosial Rp0

B. 6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial periode 30 Sep 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Realisasi Belanja Bantuan Sosial periode 30 Sep 2023 **tidak mengalami penurunan/kenaikan sebesar 00,00 %** persen dibandingkan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran belanja Bantuan Sosial selama periode 30 Sep 2023 dan 2022.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Aset Lancar

Aset Lancar Rp10.588.000

Jumlah Aset Lancar Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, per 30 Sep 2022 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp10.588.000** dan **Rp27.786.000** Aset Lancar merupakan asset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tertanggal pelaporan.

C. 1. 1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp1.480.000

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan / Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara pertanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 30 Sep 2023 dan 2022 masing-masing sebesar **Rp1.480.000** dan **Rp0** dengan rincian sebagai berikut : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2023 dan 2023

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	1.480.000	0
BANK SYARIAH INDONESIA	0	0
Jumlah	**1.480.000**	**0**

C. 1. 2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara Penerimaan Rp9.

Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Sep 2022 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dam **Rp0**

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	0	0
BANK SYARIAH INDONSEIA	0	0
Jumlah	**0**	**0**

C. 1. 3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp9.108.000

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Sep 2022 dan 2022 masing-masing sebesar **Rp9.108.000** dan **Rp27.786.000**.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan Kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara Kas yaitu Investasi Jangka Pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022 (dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas Lainnya di bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di dan Setara Kas	9.108.000	27.786.000
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	**9.108.000**	**27.786.000**

C. 1. 4 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp0

Piutang Bukan Pajak per 30 Sep 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0** dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Piutang PNBP	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	**0**	**0**

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp0

C. 1. 5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Sep 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0.** Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Nama	Tahun 2023	Tahun 2022
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
	Jumlah	0	0

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.1.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian lancer Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Sep 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Bagian Lancar tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan (TPA) yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut :

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
	Jumlah	0	0

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jk. Pendek Rp0

C.1.7 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 30 Sep 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0** yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang, masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 30 Sep 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Pendek

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak tertagih	-	0%	-

Beban Dibayar Dimuka Rp0

C.1.8 Beban DIbayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka per 30 Sep 2023 dan 2022 masing -masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Beban Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari

barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar Dimuka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 30 Sep 2023 dan 2022adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Dibayar Dimuka TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2023	Tahun 2022
Pembayaran Internet	0	0
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	0	0
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	0	0
Jumlah	**0**	**0**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.1.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan Hak Pemerintah atas layanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 30 Sep 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**,

C.1.10 Persediaan

Persediaan Rp0

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 30 Sep 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Rincian Persedian TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2023	Tahun 2022
Barang Konsumsi	0	0
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Jumlah	**0**	**0**

Semua Jenis Persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C. 2 Aset Tetap

Aset Tetap Rp0

Saldo Aset Tetap Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 30 Sep 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp10** dan **Rp0**. Aset Tetap merupaka aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

C. 2. 1 Tanah

Tanah Rp00.

Tanah yang dimiliki oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 30 Sep 2032 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut :

Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 30 Sep 2022	-
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Mutasi Kurang :	
Revaluasi Aset	-
Penghapusan	-
Saldo per 30 Sep 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Sep 2023	-
Nilai Buku per 30 Sep 2023	-

Peralatan dan Mesin Rp0

C. 2. 2 Peralatan dan Mesin

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Perlatan dan Mesin Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 30 Sep 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0** Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 30 Sep 2022	-
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Saldo per 30 Sep 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Sep 2023	-
Nilai Buku per 30 Sep 2023	-

C. 2. 3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Rp0

Gedung dan Bangunan per 30 Sep 2022 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2023

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 30 Sep 2022	-
Mutasi tambah :	
Pembangunan Gedung	-
Mutasi Kurang	-
Saldo per 30 Sep 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Sep 2023	-
Nilai Buku per 30 Sep 2923	-

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

C. 2. 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Sep 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Rincian Mutasi Jalan, irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 30 Sep 2022	-
Mutasi tambah :	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	-
Mutasi Kurang	-
Koreksi Pencatatan	
Saldo per 30 Sep 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Sep 2023	-
Nilai Buku per 30 Juni 2023	-

Aset Tetap Lainnya Rp0

C. 2. 5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Sep 2022 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0** dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 30 Sep 2022	-
Mutasi tambah :	
-	-
Mutasi Kurang	-
-	
Saldo per 30 Sep 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Sep 2023	-
Nilai Buku per 30 Sep 2023	-

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C. 2. 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 30 Sep 2022 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

C. 2. 7 Akumulasi Penyusutan Aset

Akumulasi Penyusutan Aset Rp0)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 30 Sep 2023 dan 2022 masing – masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Akumulasi Penyusutan Aset merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain bentuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset per 30 Sep 2022 :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	-	-	-
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan	-	-	-

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

C. 3 Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Rp

Piutang Jangka Panjang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 30 Sep 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C. 3. 1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp0

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Mahkamah Syar'iyah

Lhokseumawe per 30 Sep 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
	Jumlah	**0**	**0**

Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C. 3. 2 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Sep 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Rincian TPA untuk masing -masing debitur adalah sebagi berikut :

Rincian Piutang TPA TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
	Jumlah	**0**	**0**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp0

C. 3. 3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per tanggal 3 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka

Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagi berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Panjang TA 2023

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Tagihan TPA			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-	0%	-

C.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya Rp0

Saldo Aset Lainnya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0.**

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp 0

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**

Aset Tak Berwujud merupakan asset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak

memiliki wujud fisik.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 30 Sep 2022	-
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Saldo per 30 Sep 2023	-
Amortisasi s.d 30 Sep2023	-
Nilai Buku per 30 Sep 2023	-

Rincian Aset Tak Berwujud TA 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Sofware	-
2	-	-
	Jumlah	-

Aset Lain - lain Rp7.631.000

C.4.2. Aset Lain -lain

Aset Lain - lain per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut :

Rincian Mutasi Aset lain-lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 30 Sep 2022	-
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	-
Mutasi kurang :	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Penghapusan BMN	-
Saldo per 30 Sep 2023	-
Amortisasi s.d 30 Sep 2023	-
Nilai Buku per 30 Sep 2023	-

Rincian Aset Lain – lain berdasarkan nilai perolehan,

akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp0

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per tanggal 30 Sep 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0 Rp0**

Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya TA 2023

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud	-	-	
1	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-
B	Aset Lain-lain	-	-	-
Jumlah		-	-	-
Total		-	-	-

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban Jangka Pendek Rp13.343.000

C. 5 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atas jatuh tempk dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 30 Sep 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp13.243.000** dan **Rp27.786.000**

Uang Muka dari KPPN Rp1.480.000

C. 5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 30 Sep 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp1.480.000** dan **Rp0**, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang

muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp9.108.000

C. 5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Sep 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp9.108.000** dan **Rp27.786.000**, Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Utang kepada Pihak Ketiga	9.108.000
2	Utang yang belum ditagih	2.755.000
3	Uang muka dari KPPN	1.480.000
	Total	13.343.000

Pendapatan Jasa Giro merupakan bunga bank pada rekening penampungan lainnya yang belum terdaftar pada ***Treasury National Pooling (TNP)*** dan belum disetorkan ke kas Negara per tanggal pelaporan.

Potongan Pajak merupakan pungutan pajak bendahara pengeluaran atas transaksi Uang Persediaan yang belum disetorkan ke kas Negara per tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan biaya panjar perkara yang disetor oleh pihak yang berperkara dimana perkara tersebut masih dalam proses peradilan dan uang tersebut dikembalikan kepada pihak berperkara apabila proses peradilan telah selesai di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

C. 5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 30 Sep 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang / jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Penapatan Diterima di Muka TA 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
-	-
-	-
-	-
Jumlah	

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan biaya panjar perkara yang disetor oleh pihak yang berperkara dimana perkara tersebut masih dalam proses peradilan dan uang tersebut dikembalikan kepada pihak berperkara apabila proses peradilan telah selesai.

Beban yang Maih Harus Dibayar Rp208.471.321

C. 5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Sep 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp13.343.000** dan **Rp27.786.000**, merupakan kewajiban pemerintah kepada Pihak Ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar

TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022
Utang kepada Pihak Ketiga	9.108.000	27.786.000
Utang yang belum ditagihkan	2.755.000	-
Uang Muka dari KPPN	1.480.000	-
Jumlah	13.343.000	27.786.000

Ekuitas
Rp(2.755.000)

C. 7. Ekuitas

Ekuitas per 30 Sep 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp(2.755.000)** dan **Rp0**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP Rp24.776.000

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Sep 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp24.776.000 dan Rp31.730.000 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

TA 2023 dan 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	%
Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	0	0	0,00%
Pendapatan Uang Meja Leges dan Upah Panitera Badan Peradilan	510.000	20.000	5,00%
Pendapatan Ongkos Perkara	9.180.000	12.290.000	-31,00%
Pendapatan Kejaksaan dan Perdilan Lain	15.086.000	19.420.000	-43,00%

Pendapatan akrual berasal dari Pendapatan dari Uang Meja Leges dan Upah pada Panitera Badan Peradilan , Pendapatan Ongkos Perkara, dan Penadapaatn Kejaksaan dan Peradilan Lainnya.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp. 0,-

Jumlah Beban Pegawai pada periode 30 Sep 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0.** dan **Rp.0.** pada Satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak terdapat anggaran pegawai dikarenakan APBN berfokus pada Dirjen Badan Peradilan Agama.

Rincian Beban Pegawai periode 30 Sep 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	0,00
Beban Tunjangan - Tunjangan	0	0	0,00
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	0,00
Beban Lembur	0	0	0,00
Jumlah Beban	**0**	**0**	**0,00**

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp.4.183.955,-

Jumlah Beban Persediaan pada periode 30 Sep 2023 dan dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp4.183.955** dan **Rp612.000** Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode 30 Sep 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Persediaan Konsumsi	4.183.955	612.000	583,65
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0,00
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Beban	**4.183.955**	**612.000**	**583,65**

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp16.485.000

Jumlah Beban Barang dan Jasa periode 30 Sep 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp16.485.000** dan **Rp17.498.250** Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan

Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya penghematan atas beban – beban operasional perkantoran, penurunan pengiriman surat karena sudah disampaikan secara *online*, penurunan beban sewa yang disebabkan adanya pembelian asset sehingga tidak dilakukan penyewaan. Walaupun sebagian besar beban barang dan jasa mengalami penurunan, terdapat beban Listrik dan jasa profesi yang meningkat karena disebabkan meningkatnya aktivitas pelayanan dan mengundang praktisi sebagai narasumber atau penceramah pada kegiatan diklat.

Rincian Beban Barang dan Jasa

TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Operasional	0	0	0,00
Beban Non Operasional	1.485.000	0	100,00
Beban Persediaan	3.450.000	0	100,00
Beban Jasa	15.000.000	17.498.250	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas	38.380.000	18.100.000	112,04
Jumlah Beban	**58.315.000**	**35.598.250**	**63,81**

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp0,-

Beban Pemeliharaan periode 30 Sep 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban Pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas asset – asset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk periode 30 Sep 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan

TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	0
Beban Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Jumlah Beban	**0**	**0**	**0**

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp38.380.000,-

Beban Perjalanan Dinas periode 30 Sep 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp38.380.000** dan **Rp18.100.000**. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun dan adanya pelatihan yang perjalanan Dinas untuk periode 30 Sep 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas

TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Perjalanan Biasa	38.380.000	18.100.000	**112,04**
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	**0,00**
Jumlah Beban	**38.380.000**	**18.100.000**	**112,04**

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat periode 30 Sep 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0.** Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode 30 Sep 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat periode 30 Sep 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Jumlah Beban	**0**	**0**	**0,00**

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Rp0

Beban Bantuan Sosial periode 30 Sep 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0.** Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk periode 30 Sep 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial periode 30 Sep 2023 dan Tahun 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	0	0	0,00
Jumlah Beban	**0**	**0**	**0,00**

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 30 Sep 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 30 Sep 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 30 Sep 2023 dan Tahun 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	00.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	00.00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortir	**0**	**0**	00.00

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode 30 Sep 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
periode 30 Sep 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			
- Piutang Lancar	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			
- Piutang Non Lancar	0	0	0,00
Jumlah Beban	**0**	**0**	**0,00**

D.11 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp0

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Periode 30 Sep 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0** Rinciannya adalah sebagai berikut;

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0,00
Jumlah Beban	**0**	**0**	**0,00**

Pos Luar Biasa
Rp0

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban Pos Luar Biasa untuk Periode 30 Sep 2023 dan 2022

Surplus/Defisit LO
Rp. (37.027.955)

D.13 Surplus/ Defisit LO

Surplus/Defisit LO terdiri dari Kegiatan Operasional dan Non Operasional dan juga Pos Luar Biasa. Periode 30 Sep 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp(37.027.955)** dan **Rp (4.480.250).**

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Rp0

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO Rp(37.027.955)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Sep 2023 dan 2022 masing-masing adalah deficit sebesar **Rp(37.027.055)** dan **Rp(4.480.250)**. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/deficit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Rp0

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Sep 2023 adalah sebesar **Rp0**.

E. 4. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Sep 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

E. 4. 2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Sep 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Rincian Nilai Persediaan untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Persediaan	Koreksi
1	Barang Konsumsi	-
2	Suku Cadang	-
	Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset Rp0.

E. 4. 3 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Sep 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp 0.**

E. 4. 4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Sep 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0 dan Rp 0.**

E. 4. 5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain Rp0

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Sep 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0** Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E. 5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp34.272.955.

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Sep 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp34.272.955** dan **Rp4.480.250**. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Transaksi Antar Entitas TA 2023

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	34.272.955
Transfer Keluar	
Transfer Masuk	
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	**34.272.955**

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E. 5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Sep 2023 , DDEL sebesar **Rp0** sedangkan DKEL sebesar **Rp0**

E. 5. 2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Sep 2023 **Rp0.** Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Sep 2023 sebesar **Rp0.**

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Sep 2023 sebesar **Rp0.** dari total **Rp0** (jika beda nilainya, ditulis manual) yang diterima sepanjang Tahun 2022.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Sep 2023 adalah **Rp0**

E. 6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp(2.755.000)

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Sep ember 2022 dan 2022 masing-masing Adalah sebesar **Rp(2.755.000)** dan **Rp0,-**

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.

F.1. PengungkapanPengelolaan Uang Titipan Pihak Ke-3

a. Penjelasan Umum

01 Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Lembaga Yudikatif dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya mengelola keuangan anggaran bersumber dari Anggaran Belanja Negara yang dalam institusi pemerintah lebih dikenal dengan keuangan DIPA.

02 Selain keuangan DIPA, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya juga mengelola biaya proses penyelesaian perkara yang bersumber dari para pihak berperkara atau lebih dikenal dengan uang titipan pihak ketiga. Hal ini dikarenakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa untuk proses penyelesaian perkara perdata tidak dibolehkan lagi menggunakan fasilitas yang bersumber dari keuangan yang ada dalam DIPA.

03 Uang titipan pihak ketiga (pihak berperkara) ini merupakan uang persediaan yang digunakan khusus untuk membiayai penyelesaian perkara selama proses pesidangan berlangsung dan semata mata hanya dibolehkan digunakan khusus untuk perkara tertentu (mereka sendiri). Biaya proses penyelesaian perkara yang merupakan uang titipan pihak ketiga ini digunakan untuk mendukung penyelesaian perkara diantaranya biaya pemanggilan para pihak berperkara, saksi saksi, biaya pemberitahuan, biaya penyitaan dan biaya biaya lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkata tersebut.

04 Hal ini merupakan konsekuensi logis yuridis bahwa dalam perkara perdata, biaya proses penyelesaian perkara dibebankan kepada para pihak berperkara, yang pada awal proses dibebankan kepada pihak yang mengajukan gugatan/permohonan, termasuk pihak-pihak yang mengajukan upaya hukum baik upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali dan tidak dibebankan kepada negara melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara kecuali bagi mereka yang tidak mampu (perkara prodeo) dan dalam perkara gugatan di Pengadilan Hubungan Industri.

05 Pengelola uang titipan pihak ketiga pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok besar yakni:

1. Uang Titipan Pihak ketiga sebagai Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara, dan
2. Uang Titipan Pihak ketiga lainnya.

b. Informasi Keadaan Uang Titipan Pihak Ketiga sebagai Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
6. HIP (Herzein Inlandch Reglement) Staatsblad 1941 Nomor 44/RBG (Reglement Tot Regeling Van Her Rechswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927-227)
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Empat Lingkungan Peradilan Di Bawahnya.
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada

Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Definisi Biaya Perkara Dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara

1. Biaya Perkara menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Empat Lingkungan Peradilan Di Bawahnya. Biaya perkara adalah biaya yang dipergunakan langsung untuk melaksanakan proses perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Biaya Proses Penyelesaian Perkara/Biaya Proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara

3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara menurut Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI nomor 15A/SK/PAN/IX/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Biaya Proses Penyelesaian Perkara/Biaya Proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara.

Kewajiban Pengungkapan Biaya Proses Penyelesaian Perkara

Biaya proses penyelesaian perkara dipertanggungjawabkan kepada pihak- pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada putusan, dikelola secara efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam CaLK Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Kebijakan Pengelolaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara

1. Pengelolaan (pengadministrasian) biaya proses penyelesaian perkara (titipan pihak ketiga) ini terpisah dari pengelolaan (pengadministrasian) biaya yang ada dalam APBN yang tertuang dalam DIPA. Penanggungjawab pengelolaan biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan/atau Pengadilan Tingkat Banding adalah Panitera/Sekretaris.
2. Prosedur pembayaran biaya proses penyelesaian perkara harus dibayarkan oleh para pihak berperkara dengan cara langsung menyetor sendiri ke bank persepsi Pengadilan setempat setelah sebelumnya oleh Petugas Meja 1 dilakukan tentang penaksiran besarnya biaya proses dalam perkara tersebut.
3. Rekening bank biaya proses ini terpisah dari rekening bank

pengelolaan keuangan dalam APBN yang ada dalam bendahara pengeluaran. Hampir semua biaya proses perkara ini tersimpan di bank persepsi, sebagian kecil disimpan dalam brankas bendahara biaya proses yang digunakan sebagai uang persediaan untuk keperluan proses penyelesaian perkara. Besarnya pengeluaran biaya untuk proses penyelesaian perkara ini sesuai dengan tahapan persidangan/pemeriksaan perkara dan manakala uang persediaan untuk proses penyelesaian perkara ini kurang maka bendahara biaya proses akan mengambil kembali uang yang ada pada rekening bank persepsi.

4. Disamping biaya proses, terhadap para pihak berperkara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, juga dibebani untuk membayar biaya PNBP sebagai pemasukan pemerintah.
5. Oleh karena biaya proses ini merupakan titipan dari pihak berperkara yang digunakan sebagai biaya operasional selama proses persidangan perkara berlangsung, maka apabila ternyata sebelum perkara selesai biaya proses tersebut kurang, kepada pihak yang mengajukan perkara diperintahkan kembali untuk manambah biaya proses perkara. Namun apabila setelah pemeriksaan perkara selesai dan sudah tidak ada lagi kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian dan telah ternyata biaya proses dimaksud terdapat sisa biaya, maka sisa biaya tersebut dikembalikan kepada pihak berperkara.
6. Apabila ternyata pihak berperkara tidak datang untuk mengambil sisa biaya proses dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak diberitahukan kepada para pihak setelah perkara diputusan, maka sisa biaya proses tersebut disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP.

Keadaan Biaya Perkara

Keadaan biaya perkara pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 30 Sep 2023 sebagai berikut:

Tabel 2 Keadaan Biaya Perkara per 30 Sep 2023

No.	Uraian	Jumlah	
		Penerimaan	Pengeluaran
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
1	Saldo Awal	Rp. 37.715.500	-
2	Penerimaan	Rp. 76.662.0000	-
3	Biaya Proses/ATK/ Pemberkasan	-	7.000.000
4	Biaya Panggilan	-	26.406.000
5	Biaya Penerjemah	-	-
6	Biaya Pemberitahuan	-	7.685.000
7	Biaya Sita	-	-
8	Biaya Pemeriksaan Setempat	-	-
9	Biaya Sumpah	-	-
10	Biaya Pengiriman	-	1.000.000
11	Materai	-	1.140.000
12	PNBP	-	-
13	Biaya Pendaftaran	-	3.150.000
14	Biaya Penyampaian Relaas	-	3.310.000
15	Redaksi dan Lainnya	-	1.442.000
16	Pengembalia Sisa Panjar	-	34.295.000
	Jumlah	114.377.500	85.429.000

Jumlah saldo sebesar Rp. dengan rincian sebagai berikut :

1. Saldo Akhir Rp. 28.948.500

2. Kas tunai Rp. 19.840.000

3. Saldo bank Rp. 9.108.000

Penjelasan Sisa Biaya Perkara Dan Jasa Giro Biaya Perkara

Menunjuk surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268/SEK/01/V/2010 Tanggal 24 Mei 2010 tentang Sisa Biaya Perkara Dan Jasa Giro Biaya Perkara, rekapitulasi setoran PNBP yang berasal dari sisa biaya perkara dan jasa giro yang berasal dari simpanan uang di bank yang berkaitan dengan penyelesaian perkara adalah sebagai berikut:

Penjelasan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya

Setoran PNBP dari Sisa biaya perkara lewat 6 bulan setelah pemberitahuan	Rp	0,-
Setoran PNBP dari jasa giro rekening biaya perkara	Rp	0,-

Uang Panjar Biaya Eksekusi Putusan

Merupakan uang persediaan untuk membiayai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti. Apabila pihak yang "kalah" tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Semua biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah, namun sebelumnya dibayar oleh pemohon eksekusi sebagai uang panjar.

Uang Konsinyasi

Adalah uang yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama oleh pihak/orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar (debitur), karena pihak/orang yang berhak menerima pembayaran

(kreditur) tidak mau menerima.

Tabel 3 Keadaan Keuangan Titipan Pihak Ketiga

1 Januari s.d. 30 Sep 2023

No.	Uraian	Keadaan Keuangan			
		Saldo awal (Rp)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Sisa (Rp)
1	Biaya Perkara	37.715.500	76.662.000	85.429.000	28.948.500
2	Biaya Eksekusi	0	0	0	0
3	Biaya Konsinyasi	0	0	0	0
	JUMLAH	37.715.500	76.662.000	85.429.000	28.948.500

Biaya Proses

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2012 tentang Biaya Perkara dan Proses Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, pada Pengadilan tingkat pertama biaya proses diatur dan ditentukan oleh Ketua Pengadilan Tingkat pertama. Pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe biaya proses yang dipungut adalah Rp 0.000,00 untuk setiap perkara. Penggunaan biaya ini menggunakan sistem subsidi silang. Biaya proses (biaya pemberkasan) dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Materai
2. Biaya Redaksi
3. ATK
4. Penggandaan fotokopi berkas perkara/ surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara
5. Konsumsi persidangan
6. Penggandaan salinan putusan
7. Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan Pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan

surat-surat lain yang dipandang perlu

8. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara setelah diminutasi
9. Biaya penyelesaian perkara
10. Insentif tim pengelola biaya proses
11. Pengarsipan berkas perkara
12. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara perdata

F. 3 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor. W1-A501/KP.07.6/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Yarvis Luthfi
Pejabat Pembuat Komitmen	: -
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Roslia
Bendahara Pengeluaran	: Amirul Haq
Operator	: Siti Mawaddah

Laporan-laporan Pendukung

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pimpinan Lembaga ;
2. LRA Komparatif (SAKTI) final;
3. LO Komparatif (SAKTI) final;
4. LPE Komparatif (SAKTI) final;
5. Neraca Komparatif (SAKTI) final;
6. CALK (Sesuai dengan PMK 232 tahun 2022)
7. Laporan BMN per 30 September 2023
8. Necara Percobaan Kas dan Akrual per 30 September 2023
9. SHR (Surat Hasil Rekon) periode September 2023
10. Kertas Kerja Telaah Sesuai PMK 232 tahun 2022 per 30 September 2023

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
KPPN LHOKSEUMAWE

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 401665
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-09

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	76,850,000	76,850,000	0
2	Belanja	58,315,000	58,315,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	49,973,000	49,973,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	24,776,000	24,776,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	1,480,000	1,480,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,480,000	1,480,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 10-OCT-23

LAMPIRAN A1

MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE KELAS IB

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap

Untuk Periode yang Berakhir pada 30 September 2023

No	Aset Tetap	Kuantitas	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A	**Tanah**	-	-	-	-
1	Tanah Parsil				
B	**Peralatan dan Mesin**				
1	Alat Angkutan Bermotor				
2	Alat Begkel Tak Bermesin				
3	Alat Kantor				
4	Alat Rumah Tangga				
5	Alat Studio				
6	Alat Komunikasi				
7	Peralatan Pemancar				
8	Alat Kedokteran				
9	Komputer Unit				
10	Peralatan Komputer				
C	**Gedung dan Bangunan**				
	Bangunan Gedung Tempat Kerja				
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal				
D	Aset Tetap Lainnya				
1	Bahan Perpustakaan				
E	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah**				
1	Alat Angkutan Darat Bermotor				
2	Alat Rumah Tangga				
F.	**KDP**				
JUMLAH					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **MAHKAMAH AGUNG 005**
ESELON I : **DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 04**
SATUAN KERJA : **MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SEUMAWE 401665**

Tgl Data : 18/10/23 12:00 PM
Tgl Cetak : 18/10/23 2:45 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	49,973,000	24,776,000	(25,197,000)	50	43,753,000	31,730,000	12,023,000	73
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	49,973,000	24,776,000	(25,197,000)	50	43,753,000	31,730,000	12,023,000	50
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BARANG	76,850,000	58,315,000	18,535,000	76	75,725,000	35,598,250	40,126,750	47
	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **MAHKAMAH AGUNG 005**
ESELON I : **DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 04**
SATUAN KERJA : **MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SEUMAWE 401665**

Tgl Data : 18/10/23 12:00 PM
Tgl Cetak : 18/10/23 2:45 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	76,850,000	58,315,000	18,535,000	76	75,725,000	35,598,250	40,126,750	46
C	PEMBIAYAAN				0				0

Keterangan :
FINAL

LHOKSEUMAWE, 18 Oktober 2023
Penanggung Jawab UAKPA
KPA/PPK

YARVIS LUTHFI, S.H.
197612292003121001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 005	MAHKAMAH AGUNG	Kode Lap	: LRA.B.S.2
ESELON I	: 04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	Tanggal	: 19/10/23 11:04 AM
WILAYAH/PROVINSI	: 0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Halaman	: 1
SATUAN KERJA	: 401665	MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SEUMAWE	Prg ID	: lap_lra_bel_akun_satker
JENIS SATUAN KERJA	: KD		Tgl Data	: 19/10/23 6:56 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	180,000	180,000	0	0	0	0	180,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	180,000	180,000	0	0	0	0	180,000
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	1,485,000	1,485,000	1,485,000	0	1,485,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,485,000	1,485,000	1,485,000	0	1,485,000	100	0
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,450,000	3,450,000	3,450,000	0	3,450,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	3,450,000	3,450,000	3,450,000	0	3,450,000	100	0
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	30,000,000	30,000,000	15,000,000	0	15,000,000	50	15,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	30,000,000	30,000,000	15,000,000	0	15,000,000	50	15,000,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	41,735,000	41,735,000	38,380,000	0	38,380,000	91.96	3,355,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	41,735,000	41,735,000	38,380,000	0	38,380,000	91.96	3,355,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	76,850,000	76,850,000	58,315,000	0	58,315,000	75.88	18,535,000
	JUMLAH BELANJA	76,850,000	76,850,000	58,315,000	0	58,315,000	75.88	18,535,000

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (401665) MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SEUMAWE

Tgl Data : 18/10/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 18/10/23 2:45 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	24,776,000	31,730,000	(6,954,000)	(21.916)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	24,776,000	31,730,000	(6,954,000)	(21.916)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	24,776,000	31,730,000	(6,954,000)	(21.916)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	4,183,955	612,000	3,571,955	583.653
Beban Barang dan Jasa	16,485,000	17,498,250	(1,013,250)	(5.791)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	41,135,000	18,100,000	23,035,000	127.265
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

JNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (401665) MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SEUMAWE

Tgl Data : 18/10/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 18/10/23 2:45 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	61,803,955	36,210,250	25,593,705	70.681
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(37,027,955)	(4,480,250)	(32,547,705)	726.471
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(37,027,955)	(4,480,250)	(32,547,705)	726.471
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(37,027,955)	(4,480,250)	(32,547,705)	726.471

Keterangan :

FINAL

LHOKSEUMAWE, 16 Oktober 2023
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS

YARVIS LUTHFI, S.H.
197612292003121001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (401665) MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SEUMAWE

Tgl Data : 18/10/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 18/10/23 2:45 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(37,027,955)	(4,480,250)	(32,547,705)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	34,272,955	4,480,250	29,792,705	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,755,000)	0	(2,755,000)	-
EKUITAS AKHIR	(2,755,000)	0	(2,755,000)	-

eterangan :

INAL

LHOKSEUMAWE, 18 Oktober 2023

Penanggung Jawab UAKPA

KPA/PPK

MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

YARVIS LUTHFI, S.H.

197612292003121001

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)

EMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

NIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

/ILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

ATUAN KERJA : (401665) MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SEUMAWE

Tgl Data : 18/10/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 18/10/23 2:46 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	1,480,000	0	1,480,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	9,108,000	0	9,108,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	**10,588,000**	**0**	**10,588,000**	
JUMLAH ASET	**10,588,000**	**0**	**10,588,000**	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	9,108,000	0	9,108,000	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	2,755,000	0	2,755,000	0.00
Uang Muka dari KPPN	1,480,000	0	1,480,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**13,343,000**	**0**	**13,343,000**	
JUMLAH KEWAJIBAN	**13,343,000**	**0**	**13,343,000**	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	(2,755,000)	0	(2,755,000)	0.00
JUMLAH EKUITAS	**(2,755,000)**	**0**	**(2,755,000)**	**()**
JUMLAH EKUITAS	**(2,755,000)**	**0**	**(2,755,000)**	**()**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**10,588,000**	**0**	**10,588,000**	

eterangan :

NAL

LHOKSEUMAWE, 18 Oktober 2023

Penanggung Jawab UAKPA

KPA/PPK

MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

YARVIS LUTHFI, S.H.

197612292003121001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 005**	**MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I	**: 04**	**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0600**	**NANGGROE ACEH DARUSSALAM**
SATUAN KERJA	**: 401665**	**MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SEUMAWE**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 18/10/23 2:47 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	670,000	510,000	0	510,000	76.12
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	17,490,000	9,180,000	0	9,180,000	52.49
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	31,813,000	15,086,000	0	15,086,000	47.42
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	49,973,000	24,776,000	0	24,776,000	49.58
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	49,973,000	24,776,000	0	24,776,000	49.58
	JUMLAH PENDAPATAN	49,973,000	24,776,000	0	24,776,000	49.58

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)

EMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

NIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

/ILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

ATUAN KERJA : (401665) MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SEUMAWE

Tgl Data : 18/10/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 18/10/23 2:46 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,480,000	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	9,108,000	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	9,108,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	2,755,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	1,480,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	58,315,000
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	24,776,000	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	733,955
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	510,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	9,180,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	15,086,000
3.0	521211	Beban Bahan	1,485,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	15,000,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	41,135,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	4,183,955	0
		JUMLAH	**97,167,955**	**97,167,955**

eterangan :

NAL

LHOKSEUMAWE, 18 Oktober 2023

Penanggung Jawab UAKPA

KPA/PPK

MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

YARVIS LUTHFI, S.H.

197612292003121001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)

EMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

NIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

/ILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

ATUAN KERJA : (401665) MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SEUMAWE

Tgl Data : 18/10/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 18/10/23 2:46 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	58,315,000
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	24,776,000	0
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	510,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	9,180,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	15,086,000
3.0	521211	Belanja Bahan	1,485,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,450,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	15,000,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	38,380,000	0
		JUMLAH	**83,091,000**	**83,091,000**

eterangan :

NAL

LHOKSEUMAWE, 18 Oktober 2023

Penanggung Jawab UAKPA

KPA/PPK

YARVIS LUTHFI, S.H.

197612292003121001

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TRIWULAN III

Kode dan Nama UAKPA : (401665) KANTOR MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE
Kode dan Nama UAPPAW : (0600) MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
Kode dan Nama Eselon 1 : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Kode dan Nama K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG

	Objek Penelaahan	**Kondisi LK**		**Seharusnya**
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan.Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
	KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Pernyataan Tanggung Jawab			Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE			Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan			Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal			Ada
2	Neraca Percobaan Akrual			Ada
3	Neraca Percobaan Kas			Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun			Ada
	KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
	Kesesuaian Saldo	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Semua *face* laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI			Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	V		Sama
	PENGECEKAN PADA MONSAKTI			
	To Do List	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan			Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat			Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Didetilkan per tanggal pelaporan			Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan			Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada,			Tidak
6	Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan			Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan			Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan			Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan			Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan			Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan			Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan			Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	Rekon SAKTI-SPAN *(Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)*	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?			Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?			Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?			Tidak
	a. Pagu/DIPA			Tidak
	b. Estimasi PNBP			Tidak
	c. Belanja			Tidak
	d. Pengembangan Belanja			Tidak
	e. Pendapatan			Tidak
	f. Pengembangan Belanja			Tidak
	g. Kas BLU			Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran			Tidak
	i. Kas Hibah			Tidak

	j. Pengesahan Hibah Langsung			Tidak
	Rekon Internal	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Selisih Rekon Internal			Tidak
	Daftar MONSAKTI	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal			Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregsiter)			Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?			Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)			Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?			Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)			Tidak
	PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL			
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual			Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas			Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal			Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)			Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)			Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)			Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)			Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)			Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)			Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)			Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari			Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka			Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain			Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"			Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar			Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)			Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)			Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN			Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)			Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban			Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)			Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang			Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"			Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)			Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)			Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak
	Terkait Satker BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu			Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam			Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI			Tidak

	Hibah Langsung	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke			Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul			Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Tidak
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Tidak
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Tidak
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Tidak
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu			Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada **Neraca Percobaan Kas?**			Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada			Tidak
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)			Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat			Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah			Tidak
	PENGECEKAN NERACA			
	Pengecekan Pos-pos Neraca	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya			Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar			Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN			Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening			Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan			Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?			Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumya, apakah asetnya mengalami peningkatan?			Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal			Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL			
	Pengecekan Pos-pos LO	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)			Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau			Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null			Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang			Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat			Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar			Ya
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?			Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Pengecekan Pos-pos LPE	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"			Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya			Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek			Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?			Tidak

	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?			Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebakan oleh transaksi saldo awal			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas			Ya

PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)

	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat saldo negatif di LRAB			Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)			Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya			Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"			Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?			Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti			Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah			Tidak

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :			Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang			Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :			
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :			
	- Beban Persediaan (di LO)			Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :			
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)			Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?			Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?			Tidak
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?			Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Tidak
2	Apakah ada Beban Bansos ?			Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Tidak
	Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual			Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)			Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual			Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual			Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)			Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual			Ya
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual			Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,

IHKSAN

LHOKSEUMAWE, 18 SEP 2023
Penelaah,

Yarvis Luthfi

MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE